

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2021 sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang SOTK, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan RENJA PD ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2021.

Semoga penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian di Kota Blitar.

Blitar, ,Agustus, 2020
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Blitar



ARIANTO S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691018 199101 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika Penyusunan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	47
BAB V. PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2018 Kota Blitar	7
2. Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar	21
3. Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Blitar	27
4. Tabel 2.4	Usulan Program & Kegiatan dari Masyarakat & Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kota Blitar	42
5. Tabel 3.1	Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2019	47
6. Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Blitar	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dan mengacu pada RKPD
- b. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

- c. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1; dan
- d. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) ;
5. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
 11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); dan
 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah

2. Tujuan

- a. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkesinambungan dan berkelanjutan;
- b. Menjaga keberlangsungan dan kesinambungan program-program pembangunan pemerintah serta mewujudkan konsistensi dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2021 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD pada Lampiran 1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing

perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah hasil kertas kerja di bagian Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing, dengan format sebagaimana tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sesuai Lampiran 2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD

sesuai Lampiran 3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Sajikan tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota sesuai lampiran 4.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,

- Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Sajikan tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju sesuai Lampiran 5.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERA

Berisikan uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisikan Uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Dalam pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun 2019 ada program dan kegiatan yang melebihi, memenuhi maupun tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD
Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2020 Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06	Urusan Perdagangan										
3.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100	%	104	100	100	100	100	100	100,0
3.06.01.01.01	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	222	macam	97	46	46	100	46	189	85,1
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	60	cetakan	28	13	13	100	13	54	90,0
		Jumlah lembar penggandaan	178.500	lembar	45.510	44.000	31.525	72	44.000	121.035	67,8
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12	bahan bacaan	6	2	2	100	2	10	83,3
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	2.800	dos	550	1.000	1.360	136	1.000	2.910	103,9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	800	porsi	0	200	300	150	200	500	62,5
		Jumlah paket makanan khas daerah yang tersedia	60	macam	0	2	4	200	2	6	10,0
3.06.01.01.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	229	rakor	72	70	104	149	70	246	107,4
3.06.01.01.03	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	245	orang	95	50	50	100	50	195	79,6
3.06.01.01.04	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	456	rekening	72	108	108	100	108	288	63,2
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	80	unit	23	16	20	125	16	59	73,8
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	46	komponen	23	8	12	150	8	43	93,5
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	144	macam	83	25	31	124	25	139	96,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	28	macam	12	2	2	100	2	16	57,1
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	28	macam	12	3	3	100	3	18	64,3
		Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	28	macam	15	5	7	140	5	27	96,4
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	75	macam	31	3	6	200	3	40	53,3
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	59	unit	21	11	11	100	11	43	72,9
		Jumlah mebeulair yang terpelihara	18	macam	9	4	4	100	4	17	94,4
3.06.01.01.05	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	25	dokumen	13	4	4	100	4	21	84,0
3.06.01.01.06	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	9	dokumen	0	3	3	100	3	6	66,7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100	%	100	100	100	100	100	100	100,0
3.06.01.02.01	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah Event daerah dan Hari Besar Nasional yang diikuti	18	even	10	3	3	100	3	16	88,9
3.06.01.02.02	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	42	publikasi	7	13	13	100	13	33	78,6
3.06.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	100	%	100	100	100	100	100	100	100,0
3.06.01.03.01	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	54	dokumen	17	10	10	100	10	37	68,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06.01.05	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	60	%	35	35	0,93	2,6	35	71	117,7
3.06.01.05.01	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera Ulang	28.577	Alat UTTP	5.699	5.000	81	1,6	5.000	10.780	37,7
		Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	1.650	orang	0	270	270	100,0	270	540	32,7
		Jumlah alat UTTP yang didata	20.000	Alat UTTP	0	6.000	8.740	145,7	6.000	14.740	73,7
		Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	3.000	unit	0	750	750	100,0	750	1.500	50,0
3.06.01.05.02	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok	3.208	Informasi Harga	1.308	640	800	125,0	640	2.748	85,7
		Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	4.790	orang	2.520	420	420	100,0	420	3.360	70,1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Penguatan PERDAGANGAN	Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	6	%	7	5	7,14	137	5	19	314,0
3.06.01.06.01	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	2.790	unit usaha	1.190	400	400	100	400	1.990	71,3
		Jumlah PKL yang didata	3.550	unit usaha	750	750	750	100	750	2.250	63,4
3.06.01.06.02	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	820	pedagan g	288	500	500	100	500	1.288	157,1
		Jumlah usaha perdagangan yang didata	36.000	unit usaha	0	12.000	574	4,8	12.000	12.574	34,9
3.06.01.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	75	%	55	65	67	103	65	187	248,9
3.06.01.07.01	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi	21	unit	10	4	4	100	4	18	85,7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06.01.09	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	23	Kontak dagang	4	2	4	200	2	10	43,5
3.06.01.09.01	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	26	fasilitasi promosi	5	3	3	100	3	11	42,3
3.06.01.08	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	0	%	0	0	0	100	0	0	100,0
3.06.01.08.01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah Pedangan Rokok yang dimintai Informasi Tentang Pita Cukai Palsu	5.040	pedangan rokok	1.188	300	360	120	300	1.848	36,7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.07	Urusan Perindustrian										
3.06.01.05	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	13	%	0,74	1,25	0,69	55	1,25	3	20,6
3.06.01.05.01	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	jumlah peningkatan industri kecil	150	unit usaha industri	31	10	33	330	10	74	49,3
		jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	600	Unit usaha	160	200	200	100	200	560	93,3
		Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	45	Pengunjung	0	15	15	100	15	30	66,7
3.06.01.06	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	75	%	75	75	75	100,0	75	75	100,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06.01.06.01	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing practises bagi IHT	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti sosialisasi penerapan GMP	350	orang	50	100	100	100	100	250	71,4
3.06.01.07	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	7	%	5	6,25	7,43	118,9	6,25	19	273,4
3.06.01.07.01	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Industri Kecil yang Dilatih	2.405	unit usaha industri	1.160	415	360	87	415	1.935	80,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		jumlah dokumen money pelatihan	30	dokumen	0	10	10	100	10	20	66,7
		jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan	45	unit usaha	0	15	15	100	15	30	66,7
3.06.01.07.02	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	75	Pengunjung	0	25	25	100	25	50	66,7

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja Tahun 2019

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	35	0,93	2,6
2	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera Ulang	Alat UTTP	5.000	81	1,6
		Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	orang	270	270	100,0
		Jumlah alat UTTP yang didata	Alat UTTP	6.000	8.740	145,7
		Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	unit	750	750	100,0
3	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	%	1,25	0,69	55
4	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Industri Kecil yang Dilatih	unit usaha industri	415	360	87

Dari Tabel di atas, ada beberapa program dan kegiatan yang pencapaian kinerjanya tidak tercapai, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja tersebut, antara lain :

1. Untuk pelayanan tera/tera ulang, Kota Blitar Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri karna belum memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal Pasal 4 Ayat 1
2. Sudah melakukan kerjasama dengan daerah lain, yaitu Kabupaten Malang, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal

3. Masih kurangnya kemampuan pelaku IKM dalam usaha peningkatan mutu produksi

Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan yang memenuhi target Kinerja Tahun 2019

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	%	100	100	100
2	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	macam	46	46	100
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	cetakan	13	13	100
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bahan bacaan	2	2	100
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	orang	50	50	100
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	rekening	108	108	100
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	2	2	100
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	macam	3	3	100
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	11	11	100
		Jumlah mebeulair yang terpelihara	macam	4	4	100
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	dokumen	4	4	100
6	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	dokumen	3	3	100
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	%	100	100	100
8	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah Event daerah dan Hari Besar Nasional yang diikuti	even	3	3	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
9	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	publikasi	13	13	100
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	%	100	100	100
11	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	dokumen	10	10	100
12	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	unit usaha	400	400	100
		Jumlah PKL yang didata	unit usaha	750	750	100
13	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	pedagang	500	500	100
14	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi	unit	4	4	100
15	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	fasilitasi promosi	3	3	100
VIII	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	%	0	0	100
X	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	%	75	75	100,0
18	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing practises bagi IHT	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti sosialisasi penerapan GMP	orang	100	100	100
20	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Pengunjung	25	25	100

Faktor-faktor pendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan seperti pada tabel di atas, antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia yang memadai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- b. Kesesuaian substansi kegiatan dengan kegiatan dan program, sehingga saling mendukung pencapaian kinerja
- c. Target yang direncanakan sudah tepat
- d. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

Adapun Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan yang melebihi target Kinerja Tahun 2019

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	rakor	70	104	149
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	%	5	7,14	137
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	%	65	67	103
4	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	Kontak dagang	2	4	200
5	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok	Informasi Harga	640	800	125,0
		Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	orang	420	420	100,0
6	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah Pedagang Rokok yang dimintai Informasi Tentang Pita Cukai Palsu	pedagang rokok	300	360	120
7	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	jumlah peningkatan industri kecil	unit usaha industri	10	33	330
		jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	Unit usaha	200	200	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
8	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	%	6,25	7,43	118,9

Faktor – faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program / kegiatan adalah.

1. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya sumber dana yang memadai.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2019 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang rendah

Adapun kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau perbaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Dalam perencanaan dan penganggaran harus benar – benar diperhitungkan dengan seksama.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan kinerja yang direncanakan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan datang dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sesuai dengan tugas dan fungsi. Penetapan Pencapaian Kinerja sebagai Evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator kinerja dari implementasi kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar secara menyeluruh, telah diidentifikasi melalui indikator kinerja utama yang dikaitkan dengan target rencana strategis dari tahun 2016 sampai 2021. Indikator kinerja utama merupakan salah satu alat pengukuran dalam pencapaian target guna peningkatan kinerja suatu instansi. Indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari outcome masing-masing program dan output kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar.

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, terdapat 3 sasaran strategis/ kinerja utama, adapun analisa dari ketiga sasaran strategis/ kinerja utama tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan**

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar 7,5 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 600 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1,25 % dengan realisasi sebesar 7,5 %.

II. Meningkatnya Pengawasan Alat UTTP

Dari hasil perhitungan, persentase peningkatan pengawasan perdagangan sebesar 6,14 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 122,8 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 5 % dengan realisasi sebesar 6,14 %.

III. Meningkatnya Produktivitas Industri

Dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan nilai produksi industri sebesar 4,4 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 1.466,7 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 0,35 % dengan realisasi sebesar 4,4 %.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

No.	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD pada Tahun			Realisasi Capaian	Proyeksi capaian pada tahun			Catatan Analisis
				2019	2020	2021		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan		-	1,25 %	1,5 %	1,75%	7,5%	1,5 %	1,75%		
2	Persentase Peningkatan Pengawasan		-	5 %	7,5%	10 %	6,14%	7,5%	10 %		
3	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri		-	0,35%	0,4%	0,45%	4,4%	0,4%	0,45%		

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berusaha untuk mewujudkan visi Kota Blitar yakni mewujudkan **Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021** dengan, dengan mengemban misi ke-3 Kota Blitar, yakni “Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan”.

Di skala Provinsi, Misi yang terkait dengan urusan perdagangan dan perindustrian adalah misi kedua, yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi”. Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, misi kedua ini dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

- Pembangunan industri dan perdagangan yang inklusif
- Pembangunan industri dan perdagangan yang mandiri
- Pembangunan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi

Ada beberapa faktor yang menghambat dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yaitu :

- a. Belum tersedianya tempat relokasi PKL berdampak pembangunan fasilitas umum
- b. Belum terlaksananya penempatan pedagang di kios Stadion Supriadi
- c. Pengelolaan pasar tradisonal belum maksimal
- d. Untuk pelayanan tera/tera ulang, Kota Blitar Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri
- e. Pada momen tertentu terjadi kenaikan harga bahan pokok
- f. Pada momen tertentu masih terjadi kelangkaan bahan penting

- g. Masih kurangnya kemampuan pelaku IKM dalam usaha peningkatan mutu produksi
- h. Pelaku IKM masih kesulitan dalam pemasaran hasil produksi

Dari permasalahan – permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah maupun terhadap capaian program nasional. Dengan selalu memperhatikan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang menjadi dasar perumusan kegiatan-kegiatan dengan strategi antara lain :

- a. Membangun Shelter PKL sebagai tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum
- b. Mengadakan pembinaan, evaluasi dan monitoring PKL, serta Menata tempat sesuai peruntukan PKL
- c. Melakukan Pemeliharaan/ pembangunan pasar tradisional serta melakukan penataan dan pembinaan pedagang pasar
- d. Sudah mengajukan penilaian untuk mendapatkan SKKPTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/ Tera Ulang) untuk unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar pada akhir tahun 2019, dan pada tahun 2020 sudah dapat melakukan pelayanan tera/ tera ulang sendiri
- e. Selalu mengadakan monitoring bahan pokok, pendataan gudang bahan pokok dan penting, serta wajib lapor pemilik gudang
- f. Meningkatkan frekuensi operasi gabungan dengan OPD terkait
- g. Diberikan bimbingan teknis atau pembinaan dan pendampingan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri
- h. Mengikutkan pelaku usaha industri dalam even pameran/ promosi produk

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan :

1. Globalisasi pasar bebas
2. Persaingan yang semakin ketat
3. Menurunnya daya beli masyarakat
4. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas produk yang semakin tinggi
5. Rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dalam negeri

Peluang :

1. Terbukanya peluang pasar dalam dan luar negeri
2. Banyaknya komoditas unggulan yang dapat dikembangkan
3. Adanya kemauan masyarakat untuk menumbuh kembangkan usaha dibidang industri perdagangan
4. Berkembangnya teknologi

Dengan mengkaji Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dapat kita prediksi bahwa peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan dalam negeri, perbaikan iklim usaha, peningkatan daya saing ekspor, perbaikan iklim usaha serta peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dapat dicapai dengan optimal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2021 disajikan secara lengkap pada tabel 2.6 Dokumen RENJA ini.

Dari review terhadap rancangan awal RKPD, ada beberapa perubahan pada pagu indikatifnya. Hal ini dikarenakan penyesuaian

pagu yang ada dan skala prioritas kegiatan. Adanya Penambahan Pagu indikatif yang signifikan, dikarenakan adanya penambahan sub kegiatan pada Kegiatan Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Tradisional, yaitu Pembangunan Pasar Legi Tahap 2, sedangkan untuk kegiatan yang lain, menyesuaikan dengan kebutuhan dan pagu yang ada.

Tabel 2.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KOTA BLITAR

SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PILIHAN				15.733.007.819,00	PILIHAN				20.157.911.618,00	
	Perdagangan				12.120.575.819,00	Perdagangan				18.023.355.218,00	
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				12.120.575.819,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				18.023.355.218,00	
	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN		Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	100 %	2.535.036.519,00	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN		Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	100 %	2.557.816.150,00	
	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	25 macam	126.776.475,00	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	25 macam	98.997.800,00	
			Jumlah barang cetakan yang tersedia	13 cetakan				Jumlah barang cetakan yang tersedia	13 cetakan		
			Jumlah lembar penggandaan	45000 lembar				Jumlah lembar penggandaan	45000 lembar		
			Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan				Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan		
			Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	700 dos				Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	700 dos		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	200 porsi				Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	200 porsi		
			jumlah cinderamata khas daerah yang tersedia	20 macam				jumlah cinderamata khas daerah yang tersedia	20 macam		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Kota Blitar	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	50 rakor	178.500.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Kota Blitar	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	50 rakor	179.276.250,00	
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	50 orang	1.794.272.544,00	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	50 orang	1.957.272.000,00	
	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah rekening yang terbayarkan	132 rekening	420.787.500,00	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah rekening yang terbayarkan	132 rekening	308.733.100,00	
			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	16 unit				Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	16 unit		
			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 komponen				Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 komponen		
			Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	25 macam				Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	25 macam		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	5 macam				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	5 macam		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	6 macam				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	6 macam		
			Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	5 macam				Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	5 macam		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	11 unit				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	11 unit		
			Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit				Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit		
	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	4 dokumen	8.400.000,00	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	
	Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	3 dokumen	6.300.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	3 dokumen	5.537.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH		Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100 %	84.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH		Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100 %	69.678.200,00	
	Pengelolaan Administrasi dan	Kota Blitar	Jumlah event daerah dan hari	3 event	63.000.000,00	Pengelolaan Administrasi dan	Kota Blitar	Jumlah event daerah dan hari	3 event	54.382.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kelengkapan Kepegawaian		besar nasional yang diikuti			Kelengkapan Kepegawaian		besar nasional yang diikuti			
	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	12 publikasi	21.000.000,00	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	12 publikasi	15.295.800,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun, tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100 %	52.500.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun, tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100 %	7.446.000,00	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat(SKM)	Baik				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat(SKM)	Baik		
	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	9 dokumen	52.500.000,00	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	9 dokumen	7.446.000,00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	60 %	2.039.360.800,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	60 %	1.217.022.400,00	
	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	8000 Alat UTTP	1.500.000.000,00	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	(*)KOTA BLITAR	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	5000 Alat UTTP	1.059.746.900,00	
			Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	550 orang				Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	550 orang		
			Jumlah alat UTTP yang didata	8000 Alat UTTP				Jumlah alat UTTP yang didata	6000 Alat UTTP		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	750 Alat UTTP				Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	750 Alat UTTP		
	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Kota Blitar	Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	640 Informasi Harga	539.360.800,00	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Kota Blitar	Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	640 Informasi Harga	157.275.500,00	
			jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	1.050 orang				jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	1.050 orang		
			jumlah laporan monev/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol)	8 Laporan				jumlah laporan monev/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol)	8 Laporan		
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN		Persentase Usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	6 %	1.203.037.500,00	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN		Persentase Usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	6 %	941.596.020,00	
	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kota Blitar	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	400 orang	347.287.500,00	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kota Blitar	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	400 orang	586.569.720,00	
			Jumlah PKL yang didata	750 unit usaha				Jumlah PKL yang didata	750 unit usaha		
	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	60 Pedagang	855.750.000,00	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	60 Pedagang	355.026.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah usaha perdagangan yang didata	12000 Usaha Perdagangan				Jumlah usaha perdagangan yang didata	12000 Usaha Perdagangan		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISONAL		Persentase pasar dalam kondisi baik	75 %	5.365.452.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISONAL		Persentase pasar dalam kondisi baik	75 %	13.041.935.448,00	
	Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Tradisional	Kota Blitar	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi	4 Unit	5.365.452.000,00	Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Tradisional	Kota Blitar	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi	5 Unit	13.041.935.448,00	
			jumlah pedagang yang dipungut retribusi	5.223 Pedagang				jumlah pedagang yang dipungut retribusi	5.223 Pedagang		
	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)		Persentase pelanggar barang kena cukai ilegal	0 %	37.939.000,00	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)		Persentase pelanggar barang kena cukai ilegal	0 %	39.720.000,00	
	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Kota Blitar	Jumlah pedagang rokok yang dimintai informasi tentang pita cukai palsu	1680 Pedagang rokok	37.939.000,00	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Kota Blitar	Jumlah pedagang rokok yang dimintai informasi tentang pita cukai palsu	1680 Pedagang rokok	39.720.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERDAGANGAN)		Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	5 Kontak dagang	803.250.000,00	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERDAGANGAN)		Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	5 Kontak dagang	148.141.000,00	
	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri		Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha	7 Fasilitasi Promosi	803.250.000,00	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri		Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan	4 Fasilitasi Promosi	148.141.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Masyarakat (bidang perdagangan)		perdagangan dalam dan luar daerah			Masyarakat (bidang perdagangan)		dalam dan luar daerah			
	Perindustrian				3.612.432.000,00	Perindustrian				2.134.556.400,00	
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				3.612.432.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				2.134.556.400,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	3 %	1.219.260.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	3 %	1.266.506.400,00	
	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Kota Blitar	jumlah peningkatan industri kecil	50 Usaha industri	1.219.260.000,00	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Kota Blitar	jumlah peningkatan industri kecil	50 Usaha industri	1.266.506.400,00	
			jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	200 Unit Usaha				jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	200 Unit Usaha		
			Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	15 Pengunjung				Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	15 Pengunjung		
	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)		Persentase industri hasil tembakau yang menerapkan GMP	75 %	168.577.000,00	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)		Persentase industri hasil tembakau yang menerapkan GMP	75 %	59.995.100,00	
	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta	Kota Blitar	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti Sosialisasi penerapan Good Manufacturing Practises	100 orang	168.577.000,00	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi	Kota Blitar	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti Sosialisasi penerapan Good Manufacturing Practises	100 orang	59.995.100,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pelatihan dan penerapan good manufacturing					industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing					
	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERINDUSTRIAN)		Persentase Industri Kecil Terlatih	6,9 %	2.224.595.000,00	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERINDUSTRIAN)		Persentase Industri Kecil Terlatih	6,9 %	808.054.900,00	
	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (bidang perindustrian)		Jumlah Industri Kecil yang dilatih	415 Unit Usaha Industri	1.165.590.000,00	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (bidang perindustrian)		Jumlah Industri Kecil yang dilatih	215 Unit Usaha Industri	381.054.900,00	
			jumlah dokumen monev pelatihan	10 dokumen				jumlah dokumen monev pelatihan	10 dokumen		
			jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan	15 Unit Usaha				jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan	15 Unit Usaha		
	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perindustrian)	Kota Blitar	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	25 Pengunjung	1.059.005.000,00	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perindustrian)	Kota Blitar	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	25 Pengunjung	427.000.000,00	
Jumlah				15.733.007.819,00						20.157.911.618,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun pelaksanaan musrenbang baik tingkat RT / RW, Kelurahan, Kecamatan maupun forum SKPD

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT / RW

Musrenbang tingkat RT / RW merupakan penjaringan dan penggalan aspirasi masyarakat tingkat bawah (*grass roots*) yang dilaksanakan di tingkat RW. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi dan pembahasan berbagai bentuk usulan masyarakat untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan bukan sekedar keinginan kelompok tertentu. Dengan musrenbang tingkat RT / RW ini diharapkan seluruh aspirasi warga masyarakat benar-benar dapat diakomodasikan dan disalurkan sehingga program-program yang akan direncanakan betul-betul berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan pada tahap ini telah diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas yaitu benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang di dalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT / RW di kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang diusulkan lebih lanjut ke musrenbang tingkat kecamatan.

c. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah pembangunan tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kecamatan untuk menentukan prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan masing-masing Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan Rencana PD Kota pada tahun berikutnya.

Pada musrenbang Kecamatan, usulan dari Kelurahan diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilih secara rinci kemudian disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program / kegiatan dengan SKPD terkait. Pada musrenbang Kecamatan peran SKPD melalui perwakilannya adalah memberikan arahan dan mendetailkan

usulan dari hasil Musrenbang Kelurahan dalam rangka memantapkan usulan dari masing-masing Kelurahan.

d. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi / sub fungsi, kegiatan / sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan PD sebagai upaya untuk mengisi Rencana Kerja PD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait, sehingga dalam pelaksanaan forum PD diharuskan menghadirkan perwakilan dari masing-masing Kecamatan dengan membawa hasil Musrenbang Kecamatan.

PD. Namun demikian dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum PD dapat tetap dilakukan. Jumlah forum PD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan BAPPEDA, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Dalam Forum PD diharapkan terjadi proses sinkronisasi usulan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019 KOTA BLITAR

SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	A. USULAN MELALUI MUSRENBANG				
I	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERDAGANGAN)				
	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)				
1	Fasilitasi UMKM sepanjang jalan Kecamatan Sukorejo Kelurahan Pakunden Kelurahan Pakunden	Kelurahan Pakunden	Jumlah Pengusaha yang difasilitasi	30 Usaha	Diakomodir tetapi untuk kuantitas sesuai dengan jumlah anggaran yang ada
2	Fasilitasi promosi bagi industri batik,kendang,sapu dari sabut kelapa	Kelurahan Tanggung	Jumlah IKM yang difasilitasi	3 IKM	
II	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian				
	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat				
1	Pelatihan Batik, Las Listrik, menjahit dan bubut kayu	Kelurahan Ngadirejo	Jumlah IKM yang dilatih	50 IKM	
2	pelatihan pengemasan (packaging) produk unggulan	balai kelurahan plosokerep	Jumlah IKM yang dilatih	20 IKM	
3	Pelatihan tentang Pengelolaan Makanan, Kemasan dan Pemasarannya	Kelurahan Sukorejo	Jumlah IKM yang dilatih	100 IKM	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
4	Pelatihan Batik Lanjutan yang difokuskan pada keahlian teknik pewarnaan untuk Kelompok Batik Sendang Lestari	RW 02 Kelurahan Bendogerit	Jumlah IKM yang dilatih	1 IKM	
5	Pelatihan Pengolahan Keripik Buah serta studi banding ke industri sejenis	RW 1 Kelurahan Kepanjenlor	Jumlah IKM yang dilatih	1 IKM	
6	Pelatihan batik, painting kendang, pengemasan produksi	Kelurahan Tanggung	Jumlah IKM yang dilatih	120 IKM	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1. URUSAN PERDAGANGAN

Pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui dua pilar arah kebijakan, yaitu: (i) pengembangan perdagangan dalam negeri; dan (ii) pengembangan perdagangan luar negeri. Kedua kebijakan ini dilakukan secara sinergis dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan Permendag RI No. 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Sasaran pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap terakhir dari RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di wilayah dan juga di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran pembangunan ini merupakan representasi dari 5 (lima) arahan utama Bapak Presiden selama lima tahun kedepan, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),

Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Sasaran dari agenda pembangunan yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah: (i). Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan (ii). Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, dan (2) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

3.1.2 URUSAN PERINDUSTRIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No No.15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi,

dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. industri pangan (makanan dan minuman);
2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. industri alat transportasi;
5. industri elektronika dan telematika/ICT;
6. industri pembangkit energi;

7. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
8. industri hulu agro;
9. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. industri makanan dan minuman;
2. industri tekstil dan busana;
3. industri otomotif;
4. industri kimia; dan
5. industri elektronika.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu :

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri
3. Kebijakan Pemberdayaan industri
4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB)

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan

agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar di tahun 2020 sebagaimana dalam **Tabel 3.1** di bawah ini.

Tabel 3.1

Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan PDRB sektor perdagangan	11,5%	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah volume perdagangan	1,75 %
				Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	10 %
		Persentase Peningkatan PDRB sektor industri	11,7	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	0,45 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung visi dan misi walikota, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam RENSTRA Dinas tahun 2016-2021 dan sudah dibahas di Bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan strategi – strategi antara lain, yaitu :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan, dengan kebijakan :
 - Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat
 - Revitalisasi pasar tradisional
 - Menginventarisir data kelembagaan usaha perdagangan guna menciptakan penataan dan penertiban para pelaku usaha kecil dan menengah
2. Mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran produk dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan, dengan kebijakan :
 - Meningkatkan pengawasan perdagangan yang lebih menitik beratkan pada pengawasan alat Ukur, Timbang, Takar dan Peralatannya (UTTP)
 - Menyediakan sistem informasi harga bahan pokok agar konsumen dapat memperoleh informasi yang baik dan akurat tentang perkembangan harga barang dan jasa yang beredar di pasar modern maupun di pasar tradisional
3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang lebih kreatif, inovatif, tangguh, berdaya saing serta ramah lingkungan, dengan kebijakan :
 - Mengembangkan sektor industri yang dapat menciptakan struktur ekonomi yang kuat dengan menggunakan teknologi tepat guna serta memanfaatkan sumber daya lokal yang ada sehingga mempunyai value added dan meningkatkan daya beli masyarakat

- Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara pengusaha perdagangan yang handal dengan pengusaha IKM

Dari strategi dan kebijakan yang ada, maka disusunlah program dan kegiatan yang dapat mendukung langsung pencapaian sasaran dan tujuan dinas, yaitu ada 11 Program dengan 20 Kegiatan yang pelaksanaan semua program dan Dari 11 program tersebut ada 7 program yang sumber dananya dari APBD Kota Blitar, dan 4 program bersumber dari DBHCHT, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran dengan kegiatan :

- a. Pengelolaan Administrasi Perkantoran
- b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- c. Penyediaan Jasa Perkantoran
- d. Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran
- e. Penyusunan Dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
- f. Penyusunan Laporan Keuangan

2. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kegiatan :

- a. Pengelolaan Administrasi Dan Kelengkapan Kepegawaian
- b. Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

- a. Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

4. Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan dengan kegiatan :

- a. Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima
- b. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan

5. Program Pengembangan Pasar Tradisional dengan kegiatan :

- a. Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Tradisional

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan dengan kegiatan antara lain :

- a. Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (Bidang Perdagangan)

7. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan dengan kegiatan :

- a. Pengelolaan dan pengawasan metrologi Legal
- b. Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol

8. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan) dengan kegiatan :

- a. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

9. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah dengan Kegiatan :

- a. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian

- a. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- b. Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat

11. Program Pembinaan Industri (DBHCHT) dengan Kegiatan :

- a. Pengembangan IHT dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah melalui Fasilitasi Pengujian Tar dan Nikotin Rendah Bagi IKM, serta pelatihan dan Penerapan Good Manufacturing Practices bagi IHT

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KOTA BLITAR

Nama PD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	PILIHAN				20.157.911.618,00				19.990.854.618,00
3.06	Perdagangan				18.023.355.218,00				17.856.298.218,00
3.06	01. Dinas Perdagangan dan Perindustrian				18.023.355.218,00				17.856.298.218,00
3.06	01. 01. PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran		100 %	2.557.816.150,00			100 %	2.557.816.150,00
3.06	01. 01. 01. Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Kota Blitar	25 macam	98.997.800,00	DAU		25 macam	98.997.800,00
		Jumlah barang cetakan yang tersedia		13 cetakan				13 cetakan	
		Jumlah lembar penggandaan		45000 lembar				45000 lembar	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia		2 bahan bacaan				2 bahan bacaan	
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia		700 dos				800 dos	
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia		200 porsi				100 porsi	
		jumlah cinderamata khas daerah yang tersedia		20 macam				5 macam	
3.06	01. 01 02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Kota Blitar	50 rakor	179.276.250,00	DAU		60 rakor	179.276.250,00
3.06	01. 01 03	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kota Blitar	50 orang	1.957.272.000,00	DAU,		50 orang	1.957.272.000,00
3.06	01. 01 04	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Kota Blitar	132 rekening	308.733.100,00	DAU		132 rekening	308.733.100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		16 unit				16 unit	
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		8 komponen				8 komponen	
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		25 macam				25 macam	
		Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara		5 macam				5 macam	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		3 macam				3 macam	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		11 unit				11 unit	
		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		1 unit				1 unit	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3.06	01.	01	05	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	Kota Blitar	4 dokumen	8.000.000,00	DAU		4 dokumen	8.000.000,00
3.06	01.	01	06	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	Kota Blitar	3 dokumen	5.537.000,00	DAU		3 dokumen	5.537.000,00
3.06	01.	02		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota		100 %	69.678.200,00			100 %	69.678.200,00
3.06	01.	02	01	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Kota Blitar	3 event	54.382.400,00	DAU,		3 event	54.382.400,00
3.06	01.	02	02	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Kota Blitar	12 publikasi	15.295.800,00	DAU		12 publikasi	15.295.800,00
3.06	01.	03		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun, tepat waktu dan sesuai dengan aturan		100 %	7.446.000,00			100 %	7.446.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat(SKM)		Baik				Baik	
3.06	01. 03 01	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Blitar	9 dokumen	7.446.000,00	DAU		9 dokumen	7.446.000,00
3.06	01. 05	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		60 %	1.217.022.400,00			60 %	1.235.315.400,00
3.06	01. 05 01	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	(*)KOTA BLITAR	5000 Alat UTTP	1.059.746.900,00	DAU		8000 Alat UTTP	1.078.039.900,00
		Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi		550 orang				550 orang	
		Jumlah alat UTTP yang didata		6000 Alat UTTP				8000 Alat UTTP	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi		750 Alat UTTP				750 Alat UTTP	
3.06	01. 05 02	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Kota Blitar	640 Informasi Harga	157.275.500,00	DAU		640 Informasi Harga	157.275.500,00
		jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol		1.050 orang				1050 orang	
		jumlah laporan money/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol)		8 Laporan				8 Laporan	
3.06	01. 06	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN		6 %	941.596.020,00			6 %	756.246.020,00
3.06	01. 06 01	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kota Blitar	400 orang	586.569.720,00	DAU		400 orang	398.819.720,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah PKL yang didata		750 unit usaha				750 unit usaha	
3.06	01. 06 02	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Kota Blitar	60 Pedagang	355.026.300,00	DAU,		60 Pedagang	357.426.300,00
		Jumlah usaha perdagangan yang didata		12000 Usaha Perdagangan				12000 Usaha Perdagangan	
3.06	01. 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISONAL		75 %	13.041.935.448,00			75 %	13.041.935.448,00
3.06	01. 07 01	Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Tradisional	Kota Blitar	5 Unit	13.041.935.448,00	DAU,		5 Unit	13.041.935.448,00
		jumlah pedagang yang dipungut retribusi		5.223 Pedagang				5.223 Pedagang	
3.06	01. 08	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)		0 %	39.720.000,00			0 %	39.720.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3.06	01. 08 01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah pedagang rokok yang diminta informasi tentang pita cukai palsu	Kota Blitar	1680 Pedagang rokok	39.720.000,00	DBHCHT		1680 Pedagang rokok	39.720.000,00
3.06	01. 09	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERDAGANGAN)	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain		5 Kontak dagang	148.141.000,00			5 Kontak dagang	148.141.000,00
3.06	01. 09 01	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	(*)Fasilitasi UMKM sepanjang jalan Kecamatan Sukorejo Kelurahan Pakunden Kelurahan Pakunden, (*)Fasilitasi promosi bagi industri batik,kendang,sapu dari sabut kelapa Kecamatan Kepanjenkidul Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung	4 Fasilitasi Promosi	148.141.000,00	DBHCHT		5 Fasilitasi Promosi	148.141.000,00
3.07	.	Perindustrian				2.134.556.400,00				2.134.556.400,00
3.07	01.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				2.134.556.400,00				2.134.556.400,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
3.07	01. 05	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM		3 %	1.266.506.400,00			3 %	1.266.506.400,00
3.07	01. 05 01	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Kota Blitar	jumlah peningkatan industri kecil		50 Usaha industri	1.266.506.400,00	DAU,		50 Usaha industri	1.266.506.400,00
				jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah		200 Unit Usaha				200 Unit Usaha	
				Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama		15 Pengunjung				15 Pengunjung	
3.07	01. 06	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)		Persentase industri hasil tembakau yang menerapkan GMP		75 %	59.995.100,00			75 %	59.995.100,00
3.07	01. 06 01	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta	Kota Blitar	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti Sosialisasi penerapan Good Manufacturing Practises		100 orang	59.995.100,00	DBHCHT,DAU		100 orang	59.995.100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	pelatihan dan penerapan good manufacturing									
3.07	01. 07	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERINDUSTRIAN)	Persentase Industri Kecil Terlatih		6,9 %	808.054.900,00			6,9 %	808.054.900,00
3.07	01. 07 01	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (bidang perindustrian)	Jumlah Industri Kecil yang dilatih	(*)Pelatihan Batik Lanjutan yang difokuskan pada keahlian teknik pewarnaan untuk Kelompok Batik Sendang Lestari Kecamatan Sananwetan Kelurahan Bendogerit RW 02 Kelurahan Bendogerit, (*) Pelatihan tentang Pengelolaan Makanan, Kemasan dan Pemasarannya Kecamatan Sukorejo Kelurahan Sukorejo Kelurahan Sukorejo, (*)Pelatihan Pengolahan Keripik Buah serta studi banding ke industri sejenis Kecamatan Kepanjenkidul Kelurahan Kapanjelor RW 1 Kelurahan Kepanjenlor, (*)Pelatihan batik, painting kendang, pengemasan produksi Kecamatan Kepanjenkidul	215 Unit Usaha Industri	381.054.900,00	DBHCHT		215 Unit Usaha Industri	381.054.900,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kelurahan Tanggung, (*Pelatihan batik,painting kendang, pengemasan produksi Kecamatan Kepanjenkidul Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung, (*pelatihan pengemasan (packaging) produk unggulan Kecamatan Sananwetan Kelurahan Plosokerep balai kelurahan plosokerep						
		jumlah dokumen monev pelatihan		10 dokumen				10 dokumen	
		jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan		15 Unit Usaha				15 Unit Usaha	
3.07	01. 07 02	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perindustrian)	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Kota Blitar	25 Pengunjung	427.000.000,00	DBHCHT,,DAU	25 Pengunjung	427.000.000,00
TOTAL						20.157.911.618,00			19.990.854.618,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021 yang berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2021. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
 - a. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - b. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2021 dan tahun 2022.
 - c. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2021;

- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021 ;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.
- d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2021 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

3. Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance* melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, sajian dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat kepada siapapun juga atau setidak-tidaknya dapat mengetahui kedudukan tugas dan fungsi serta kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Memperhatikan percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan kurun waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai tujuan sesuai dengan target masing-masing

kegiatan perlu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar.

Blitar, , Agustus , 2020
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Blitar

The image shows a blue circular official stamp of the Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA" at the top, "DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN" in the center, and "BLITAR" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "ARIANTO S.Sos., M.Si." is printed in bold, followed by the title "Pembina Utama Muda" and the NIP number "19691018 199101 1 001".

ARIANTO S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691018 199101 1 001